

KOPI DAN GULA: PERKEBUNAN DI KAWASAN *REGENTSCHAP* MALANG, 1832-1942

Reza Hudiyanto

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Abstrak: Jawa sangat terkenal dengan kekayaan pertanian seperti kopi dan gula. Kondisi ini begitu dipahami oleh pemerintah. Di masa lalu, pemerintah kolonial mengeksploitasi tanah dan orang untuk bekerja di lahan tersebut. Salah satu dari wilayah yang sangat subur terletak di antara bukit antara gunung Bromo dan gunung Semeru, Malang. Perkebunan ini telah memiliki dampak berganda pada kehidupan sosial ekonomi. Tulisan ini akan mendeskripsikan keterkaitan antara perkebunan dan pertumbuhan Malang dari pertengahan abad ke-19 dan ke-20. Lebih lanjut, hal ini akan menyadarkan masyarakat bahwa aktivitas-aktivitas tersebut merupakan permulaan dari keterlibatan orang Jawa dalam pasar dunia.

Kata-kata kunci: perkebunan, produk agraris, sejarah sosial-ekonomi, Malang

Abstract: Java is known as the source of agricultural product of rice and sugar. This condition is well-known by the government. In the past, the colonial government exploited the land and the people in this land. One of the most favorable areas located in the high land between Bromo and Semeru mountains, Malang. This plantation had made multiplied effect on the social economic life. This article will describe the relation of the advance of plantation and the growth of Malang Regency from the middle of the 19th century to 20th century. In addition, it will realize people that those activities are the beginning of Javanese people involvement in the world market.

Keywords: plantation, agricultural product, social-economic history, Malang

“Cucuku, dulu waktu aku masih anak-anak, makmur benar keadaan kita. Pada waktu itu alun-alun masih dikelilingi pagar tanaman jarak dan masih di dalam kekuasaan Kanjeng Regent (Bupati). Di sebelah Lor (utara)- dimana sekarang ada lapangan tenis, dahulu ada loods-loods tempat penyimpanan kopi milik Kanjeng Gouvernement. Pada saat oogst (panenan) kopi, beberapa loods itu penuh sesak (kopi) sehingga tidak dapat termuat semuanya. Dari hari ke hari, dari pagi hingga sore cikar bermuatan kopi dari desa beserta pemiliknya datang tidak henti-hentinya. Aku bersama teman-temanku bermain-main di dekat los-los itu dan biasanya diberi persen oleh penjual kopi tadi (Tjahaja Timoer 29 Juli 1921).

Paragraf di atas diambil dari *Tjahaja Timoer*, sebuah surat kabar lokal Malang berbahasa Melayu yang terbit pertama kali pada tahun 1907. Deskripsi tersebut mengindikasikan kontribusi dari perkebunan kopi terhadap perkembangan kota di pedalaman Jawa. Dalam sejarah Indonesia, tidak ada aktivitas yang sangat menyita lahan dan penduduk di negara ini selain perkebunan. Perolehan devisa negara kolonial sangat mengandalkan produktivitas dari sektor perkebunan. Pengenalan perkebunan menjadi sebuah titik balik yang sangat penting dalam perkembangan bangsa Indonesia, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Kehidupan perkebunan ini menjadi sumber inspirasi

Edward Douwes Dekker dalam novel *Max Havelaar* (2014). Sikap ini dianggap sebagai respon kritis pertama terhadap kebijakan ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda. Sikap kritis terhadap praktek eksploitasi buruh yang sering dilakukan pengusaha (*ondernemers*) di perkebunan swasta memberi inspirasi Douwes Dekker yang pernah bekerja di Perkebunan Kopi Sumber Duren Malang dan Pabrik Gula Padjarakan, Probolinggo untuk menulis novel *Max Havelaar* (*Tempo*, 26 Agustus 2012, 66-65).

Perkebunan telah menjadi awal munculnya dua basis ekonomi penduduk Jawa yaitu ekonomi modern dan tradisional. Dalam beberapa hal, ekonomi perkebunan yang menjadi pintu masuk kapitalisme ini merupakan akar dari munculnya kesenjangan sosial di Indonesia pada era-era berikutnya. Setidaknya ini berdasar pada teori Boeke perkebunan telah menciptakan ekonomi modern dan tradisional yang masing-masing ibarat sebuah kapsul yang tersekat satu sama lain. Ekonomi modern memiliki produksi skala besar dan berorientasi internasional. Sebaliknya, ekonomi tradisional memiliki skala produksi terbatas, bahkan subsisten dan berorientasi domestik. *Multiplying effect* yang muncul akibat aktivitas ekonomi perkebunan telah mengubah *landscape* alam dan sosial masyarakat pedalaman Jawa. Infrastruktur, birokrasi, dan monetisasi telah mengubah struktur masyarakat Jawa secara perlahan.

Oleh karena itu, banyak sejarawan yang menaruh perhatian pada kajian perkebunan, baik di Jawa maupun Luar Jawa. Beberapa sejarawan Indonesia yang menaruh perhatian terhadap masalah perkebunan antara lain adalah Sugijanto Padmo (1994), Sartono Kartodirjo (1973), Suhartono (1993), Yuliati Surojo (1989), dan Bambang

Purwanto (1992). Dari beberapa disertasi tersebut, hanya Bambang Purwanto (1992) yang memiliki penekanan pada ekonomi rakyat dalam tulisan *From Dusun to Market*. Berdasarkan hasil penelitian mereka, dapat diketahui bahwa perkebunan memainkan peran terpenting dalam proses transisi masyarakat Jawa. Sekalipun demikian, perkebunan merupakan pintu masuk dari perkembangan kapitalisme di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat beberapa kantong perkebunan besar, antara lain di Bandung, Bogor, Malang dan Jember. Malang memiliki posisi unik di antara berbagai kawasan lain. Tempat ini bukanlah tempat yang penting sebelum masuknya ekonomi perkebunan. Kebijakan di bidang ekonomi dari Pemerintah Kolonial Belanda pada abad XIX telah membuat wilayah ini maju pesat. Di kawasan ini, aktivitas perkebunan ini memberikan dampak sosial ekonomi yang cukup luas. Artikel ini mencoba mendeskripsikan dampak-dampak dari aktivitas perkebunan terhadap kawasan Kabupaten Malang.

PERKEMBANGAN POLITIK- ADMINISTRASI PADA AWAL ABAD XVIII HINGGA PADA ABAD XIX

Regentschap Malang mencakup wilayah yang cukup luas. Secara administratif, wilayah mencakup delapan distrik yaitu Ngantang, Penanggungan, Pakis, Karanglo, Gondanglegi, Turen, Sengguruh (Kepanjen), dan Kota Malang. Kawasan ini sekaligus merupakan sebuah pusat aktivitas kelompok pengusaha perkebunan di kawasan Lereng Semeru, Bromo, Arjuna, dan Kawi. Kawasan ini merupakan kawasan yang sangat subur sehingga banyak dijumpai

Onderneming pada akhir abad XIX. Tahun 1832 dijadikan sebagai batas awal tulisan ini karena pada tahun tersebut pemerintah kolonial memulai pembukaan lahan di kawasan Kabupaten Malang untuk penanaman lahan perkebunan kopi (Domis, 1836:95). Tahun 1942 dijadikan batas akhir karena pada tahun ini Jepang menduduki wilayah Malang sehingga berdampak pada terhentinya aktivitas perkebunan. Setelah tahun 1950, produktivitas perkebunan ini tidak pernah lagi mencapai titik kejayaan sebagaimana yang telah dicapai pada periode 1900-1930an.

Berbeda dengan kawasan pedalaman lain di Pulau Jawa, pada awal abad XIX, kepentingan ekonomi Belanda belum terlalu menyentuh kawasan Malang. Kawasan ini masih tergolong kawasan *frontier* dan secara politis menjadi tempat yang menurut versi Kumpeni sebagai “kurang aman”. Pada pertengahan awal abad XVIII, kawasan ini menjadi basis perlawanan terhadap aliansi Kumpeni-Mataram (Kasdi, 2003:171-172). Wilayah Ujung Timur yang mencakup garis pantai Selat Madura dan membentang dari Porong, Bangil, Pasuruan hingga Banyuwangi telah lama menjadi wilayah yang ditaklukkan oleh pusat kekuasaan Jawa di Jawa Tengah. Sunan di Kartasura menyebut “kekerasan hati” para penguasa di Ujung Timur ini dengan istilah “*malangi*” (menghalangi).

Daerah Ujung Timur ini terdiri atas dua bagian, bagian Utara dan Timur. Kawasan Utara merupakan daerah pantai sehingga memungkinkan terjadinya kontak antara kelompok “pembangkal istana” ini dengan kelompok dari etnis lain seperti Bali, Makasar, dan Madura. Kawasan Selatan dari Ujung Timur ini adalah kawasan pegunungan

dan terisolir sehingga membuat tempat ini menjadi pusat perlawanan terhadap Kumpeni sekaligus benteng alam untuk membendung ekspansi kekuatan Mataram dari arah Barat. Beberapa tokoh oposisi istana Kartasura seperti Prabujaka, Pengeran Singasari, dan Pangeran Dipanegara menjadikan kawasan ini sebagai basis perlawanan. Daerah ini pada akhirnya dikuasai Kumpeni pada tahun 1767 (Domis, 1836:3)

Setelah mengalami kevakuman akibat penggabungan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Bangil, pada tahun 1819 wilayah Malang kembali dijadikan kabupaten tersendiri di bawah pimpinan bupati Raden Tumenggung Notodiningrat I (1819 - 1839). Pada periode awal tersebut, Malang masih terdiri atas enam distrik yaitu Kota, Pakis, Gondanglegi, Penganggungan, Karanglo, dan Ngantang (van Schaik, 1996:3) Di Kademangan Penanggungan dan Karanglo banyak terdapat tanaman kopi. Sementara itu, penduduk wilayah Gondanglegi – yang berada di kawasan tenggara, masih belum terlalu banyak. Sebelum tahun 1826, sebagian besar kawasan ini masih hutan dan penulis Eropa menyebut Kota Malang sebagai *hoofdnegorij* (dusun yang ramai) karena tidak menunjukkan karakter fisik sebuah kota. Disamping itu, penduduk masih sangat sedikit sementara wilayah yang harus ditangani sangat luas (Domis, 1836:40). Hal ini membuat penguasa kolonial harus mengandalkan peran dari penguasa lokal dalam hal ini bupati (Schrieke, 1956:76).

KONDISI LAHAN DAN EKONOMI

Kabupaten Malang ini berada di antara dua barisan pegunungan yaitu pegunungan Arjuna-Kawi di sebelah barat dan Bro-

mo-Semeru di sebelah timur. Kondisi ini menyebabkan beberapa faktor positif dan negatif. Posisi ini menyebabkan tanah menjadi kaya dengan abu vulkanis dan sumber air. Dua faktor ini sangat menguntungkan dalam pengembangan lahan pekebunan (van Kol, 1919:649).

Sekalipun demikian, faktor hambatan alam ini menyebabkan Malang menjadi daerah yang relatif tertutup dengan daerah lain sehingga perkembangan daerah Malang menjadi agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah lain. Ini menyebabkan pemerintah kolonial kurang begitu memprioritaskan daerah ini pada dekade awal abad XIX. Perhatian mereka masih terpusat pada daerah pesisir dan kawasan pedalaman yang menjadi pusat pemerintahan. Ini dibuktikan dengan kelangkaan informasi yang menerangkan kawasan Malang sebelum tahun 1829. Daerah Malang masih dikatakan sebagai *stad in wildernis* (van Schaik, 1996). Wilayah ini

masih belum terlalu produktif. Pernyataan ini diperkuat oleh Elson (1984) dalam studi tentang Petani di Karesidenan Pasuruan pada tahun 1830-1930. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.

Ekspansi VOC ke wilayah ini sebenarnya bukan karena motif ekonomis namun lebih alasan politis karena daerah Malang tidak memberikan produk yang membuat VOC merasa perlu untuk memberikan perhatian khusus. Keterangan ini diperkuat oleh salah satu sumber yang menyatakan bahwa VOC melikuidasi kabupaten Malang dan menggabungkannya ke Kabupaten Bangil pada akhir abad XVIII karena tidak cukup banyak memberikan beras kepada VOC. Hingga tahun 1820, kabupaten di kawasan Selatan Pasuruan itu masih dianggap *frontier* dan tidak memberikan manfaat ekonomi penting (Elson,1983:19-20).

Tabel 1. Jumlah Lahan Sawah di wilayah Karesidenan Pasuruan

Kabupaten	Tahun 1815	Tahun 1828
Pasuruan	12.420	13.850
Bangil	8.199	8.189
Kraksaan	6.330	8.797
Malang	2.487	4.780
Probolinggo	2.614	2.722
Lumajang	727	1.972

Sumber: Elson (1983:19)

Perkembangan kawasan perkebunan di wilayah Kabupaten Malang ini baru terjadi pada tahun 1826. Ada dua faktor yang cukup berpengaruh yaitu pertama terkait dengan gagasan Gubernur Jendral Du Bus de Gisignies (1826-1829). Dia berusaha untuk menambah kapasitas produksi dengan mengalihkan tanah-tanah yang tidak

berpenghuni dan terasing kepada pengusaha perkebunan Eropa. Dia berharap dengan kebijakan itu Jawa akan menyediakan jumlah produksi tanaman ekspor yang cukup besar yang sebelumnya gagal dilakukan. Perhatian akhirnya menuju ke daerah Pasuruan Selatan yang dianggap masih banyak belum tergarap.

Kedua, pemerintah kolonial mulai memperhatikan kawasan Selatan terkait dengan keberhasilan Malang dalam mengirimkan hasil perkebunan kopi. Pada tahun 1826, seiring dengan terbentuknya Negara Kolonial Belanda, kawasan Malang mulai menjadi bagian tidak terpisahkan dari sasaran eksploitasi. Kondisi tertutupan dan keterbelakang ini mulai berubah pada tahun 1826, Gubernur Jendral Du Bus Gesignes mengeluarkan perintah mengubah semua tanah-tanah yang belum digarap, termasuk sebagian tanah di daerah hutan, untuk dijadikan sebagai lahan produktif. Dampak dari kebijakan ini sampai di daerah Karesidenan Pasuruan. Banyak tanah-tanah tegalan, lahan kosong yang kemudian berubah menjadi perkebunan kopi dan tebu. Perkebunan kopi tersebar di distrik Pakis, Ngantang, Sisir (Batu), dan Penanggungan. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah kolonial itu menyebabkan Malang tumbuh menjadi pusat perkebunan kopi. Ini diperkuat oleh catatan dari Residen Pasuruan yang mengatakan bahwa antara tahun 1827 hingga 1830 penduduk Kabupaten Malang - yang hanya sejumlah 40.000 jiwa dapat menghasilkan 57.000 *pikul* kopi (Lakeman, 1924:14).

Hingga pertengahan abad XIX, penduduk Bumiputra merupakan mayoritas penduduk *Afdeling* Malang. Sebagian besar dari mereka “miskin”, namun ada beberapa di antara mereka yang kaya, terutama yang berasal dari distrik Pakis dan Penanggungan. Di daerah tersebut banyak orang bisa mendapatkan 100 hingga 200 *pikul* kopi dari kebunnya sendiri. Mereka mengirimkan produk itu ke gudang pemerintah. Disamping itu, terdapat banyak *onderneming* yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Pekerjaan itu belum termasuk aktivitas pertanian dan peternakan yang menjadi pekerjaan tambahan bagi penduduk Bumiputra. Khusus penduduk lapisan bawah, yaitu para kuli, mereka tidak pernah memperoleh upah per harinya di bawah 40 sen hingga 50 sen (*Algemeen verslag afdeeling Malang 1847*).

Penduduk Tionghoa dan Madura berdatangan pada kurun 1855-1885. Orang-orang Madura itu bekerja sebagai buruh lepas di tanah-tanah tegalan sementara orang Tionghoa menjalankan fungsinya sebagai pedagang. Keberadaan mereka tidak terlepas dari posisi onderdistrik Malang sebagai kota transito. Pada umumnya para penanam kopi itu membutuhkan waktu cukup lama untuk mengangkut kopi dari daerah pedalaman ke onderdistrik kota. Di Onderdistrik kota, biji-biji kopi yang telah *disangrai* (goreng tanpa pasir) dikumpulkan di gudang-gudang sebelum dikirim ke pelabuhan Surabaya. Proses itu membutuhkan waktu berhari-hari sehingga mereka untuk sementara harus tinggal di onderdistrik kota Malang. Faktor inilah yang menyebabkan terbukanya sektor-sektor yang melayani kepentingan pada petani kopi tersebut (Arthur van schaik, 1996:19).

Pada masa kepemimpinan Bupati Notodiningrat II, pemerintah kolonial membuka jalur kereta api Malang-Surabaya pada tahun 1879 dan jalur tram pada tahun 1889. Keberadaan dua mode transportasi massal itu telah menghilangkan hambatan alam yang selama itu telah menjadikan Malang sebagai daerah tertutup. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, karakter fisik dari sebagian besar kawasan Malang adalah kawasan *inter-mountain valley*. Dalam posisi tersebut, sebuah wilayah dikatakan berada

pada posisi yang diapit pegunungan sehingga menutup akses dari kawasan lain dari sebelah Barat maupun Timur. Sekalipun demikian, pembukaan ratusan hektar perkebunan di pedalaman Malang ini juga memberikan dampak sosial ekonomi lain.

PEMBENTUKAN BIROKRASI

Heater Sutherland (1983) menyatakan bahwa ciri khas dari Negara Kolonial terletak pada karakter *bureacratic state* (negara birokrasi). Elit birokrasi yang telah terbentuk sejak era Mataram Islam ini justru diperkuat pada masa VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda. Ini semua terkait dengan proposal Van Den Bosch untuk menutup kas Belanda yang sedang mengalami defisit. Langkah ini sesungguhnya sudah dirintis oleh Gubernur Jendral sebelumnya, Burgraaf Du Bus Gesignies (1826-1829). Keberhasilan Du Bus Gesignes tidak lepas dari peran bupati sebagai “*broker*” tenaga kerja bagi ambisi pemerintah kolonial. Bupati melaksanakan tugasnya sebagai organisator korps pamongpraja. Dia memiliki kedudukan yang hampir sama dengan asisten residen. Dia dibantu patih dalam masalah administrasi pemerintahan di pusat, dan para wedana dalam masalah administrasi di tingkat distrik atau kawedanan.

Berbeda dengan bupati pada era Mataram, setelah tahun 1822, bupati menjadi pegawai pemerintah kolonial dan mendapat gaji. Sebagai ganti, mereka tidak lagi menuntut penyerahan dan kerja wajib dari rakyatnya. Namun dalam beberapa kasus masih terdapat bupati yang memanfaatkan “hak-hak lama” mereka sekalipun telah mendapat gaji dari Pemerintah Kolonial. Disamping birokrasi Bumiputra (Pamong

Praja), terdapat birokrasi Eropa (*Europeesche Bestuur*) yang melakukan pengawasan terhadap eksploitasi hasil bumi. Posisi teratas yaitu residen dibantu oleh polisi, jaksa dan petugas pengadilan. Ada tiga orang polisi yang ditempatkan di setiap wedana. Disamping birokrasi formal, terdapat komite yang menangani produksi, prosesing, dan distribusi kopi (Lakeman, 1934:14). Pemerintah Kolonial sangat mengandalkan peran bupati. Disamping dianggap sebagai strategi kebudayaan dan pasifikasi, keterlibatan bupati memudahkan pemerintah kolonial dalam mendapatkan tenaga kerja. Setidaknya ini dapat dilihat pada *Regeering Reglements 1854* pasal 67 dan 69:

”Sejauh keadaan mengizinkan, penduduk pribumi hendaklah dibiarkan berada di bawah pengawasan pemimpin-pemimpin mereka sendiri, baik yang diangkat maupun yang diakui oleh Pemerintah, yang tunduk kepada semacam supervisi yang lebih tinggin yang akan diterapkan dengan peraturan kumum atau khusus dari gubernur Jendral (Sutherland, 1983:42).

Pada umumnya, para pegawai, termasuk bupati ini tinggal pada satu kompleks kawasan alun-alun kota. Kawasan ini telah terbentuk di Malang sejak tahun 1822. Bupati, asisten residen, *geldkamer*, jaksa tinggal dalam satu kompleks di alun-alun. Nama-nama jalan yang berada di kawasan ini juga menunjukkan riwayat masa lalu dari kawasan tersebut. Sebagai contoh nama Tumenggungan, Kidul Dalem, Kidul Pasar, dan jalan Kabupaten. Jika dihubungkan dengan keterangan Domis, maka nama Tumenggungan itu kemungkinan besar berasal dari jabatan Tumenggung (Lakeman, 1924:15) Tumenggung – jika disebut secara lengkap adalah Raden Tumenggung, adalah

gelar dari Bupati Malang kedua. Hingga paruh kedua Abad XIX, pengaruh bupati terhadap rakyat cukup besar, hingga digambarkan dengan kalimat “keinginan bupati adalah hukum”. Penghormatan terhadap bupati bahkan menyamai penyembahan terhadap dewa. Hubungan inilah yang dimanfaatkan pemerintah kolonial dalam merekrut tenaga kerja dan memperoleh lahan dalam kebijakan sistem tanam (Lakeman, 1924:20).

Perubahan yang cepat terjadi pada masa pemerintahan Raden Adipati Aria Notodiningrat III (1884-1894). Pada tahun 1870 *onderneming-onderneming* yang sebelumnya digarap oleh rakyat itu mulai disewa oleh orang-orang Belanda. Pada periode tersebut perluasan lahan perkebunan swasta telah berdampak pada kota Malang. Mulai ada pengaturan secara administratif Kota Malang yang ditandai dengan pembagian wilayah pada tingkat *onderdistrik* yang terdiri atas *wijk-wijk* (sebuah unit wilayah setingkat kampong) dan penetapan batas. Batas-batas *wijk* untuk kota Malang baru ditetapkan pada tahun 1873 berdasar surat keputusan Residen Pasuruan tanggal 15 Juli 1873 (*Politiek verslag van afdeeling Malang*, 1873). Dengan penetapan batas tersebut maka konsep dasar kota mulai terbentuk.

Struktur lembaga pemerintahan masih sangat sederhana. Pegawai Eropa pada waktu itu masih terbatas pada seorang asisten residen dan dua orang kontrolir. Mereka bertugas memantau pemasukan hasil bumi dari desa-desa dan perkebunan-perkebunan sekaligus mengontrol “kinerja” para aparat Bumiputera. Selain asisten residen dan kontrolir masih terdapat posisi yang dimainkan orang Bumiputera yaitu pengelola gudang kopi, juru tulis, dan kepala gudang kopi. Pegawai pribumi

pada waktu itu terdiri dari seorang bupati, seorang patih, dan 7 orang wedana untuk setiap distrik. Masing-masing distrik memimpin 7 *bekel* (lurah), 15 orang *gecommitterden* (kelompok pengelola) untuk perkebunan kopi. Tim ini terdiri atas seorang juru tulis bupati, juru tulis wedana, juru tulis kontrolir, juru tulis pembantu kontrolir, dan jaksa (*Politiek verslag van afdeeling Malang*, 1873:30)

Sementara itu, aparat di tingkat desa terdiri atas mantri besar, *kliwon*, *penghulu* (tokoh agama), dua orang *kebayan* (pengantar surat) bupati dan 3 orang petugas vaksinasi, 7 orang *ulu-ulu* (pengatur air) untuk 7 distrik dan 25 orang *kadjienemand* (*Politiek Verslag 1873*). Di dalam hirarki kekuasaan tersebut, *petinggi* merupakan posisi terendah. Sekalipun demikian, pemerintah kolonial sangat mengandalkan kemampuan mereka dalam mencari tanah dan tenaga kerja. Oleh karena itu, ada beberapa *petinggi* yang menyalahgunakan kekuasaan. *Petinggi* yang menyalahgunakan uang tidak terlepas dari hukuman. Beberapa *petinggi* yang pernah melakukan pelanggaran hukum bernama Setjoleksono, Singosetro dan Tarunoleksono. Setjoleksono mendapat hukuman 5 tahun kerja paksa sementara Setjoleksono dan Tarunoleksono mendapat hukuman kerja paksa 1 tahun tanpa belunggu. Sementara di desa Wonokerto seorang *petinggi* desa dipecat karena melakukan kejahatan bersama rekan-rekannya (*Politiek verslag van Afdeeling Malang 1873*).

PERKEMBANGAN LAHAN PRODUKTIF (1839-1884)

Sumber awal yang menyebutkan kondisi vegetasi dan penduduk Malang terdapat pada laporan Domis. Dalam laporan

itu disebutkan bahwa kawasan ini dipenuhi dengan tanaman padi, kelapa, pinang, mangga, pisang, manggis, langsep, nanas dan durian. Tanaman selain padi yang dikenal adalah kedelai, ketela, kapas, jagung, labu, gadung, kacang, tebu, indigo, jambu, dan tanaman tropis lainnya. Sumber kolonial menyebut jenis tanama ini sebagai *twede gewassen*. Di tempat lain, terutama Ngantang dan Batu, banyak dijumpai tanaman kopi. Pada umumnya penduduk menanam padi pada awal penanaman, sesudah itu disusul dengan jagung, kacang dan kedelai. Aktivitas persemaian dan penanaman dilakukan oleh wanita, sementara pekerjaan pengolahan tanah dilakukan laki-laki, dibantu hewan ternak berupa kerbau. Jenis hewan di kawasan ini masih cukup banyak, yaitu kuda, kijang, kancil, landak, harimau, kera, musang dan hewan-hewan ternak lain. Di distrik Penanggungan, belakang desa Gandol dikatakan terdapat tambang emas. Kandungan emas ini juga terdapat di kawasan Songgoriti namun nilai ekonomis dari tambang ini nampaknya tidak terlalu tinggi sehingga tidak berkembang. Sebagian gambar detail dari perjalanan Domis ini diuraikan sebagai berikut.

“Setelah perjalanan saya di Jawa pada tahun 1834, saya telah menjumpai 18 penggilingan yang digerakkan oleh air. Ada Tuan Wijnmalen, Van Der Hilst, Hofland, De Bregkas, MacLanne, Watson dan seorang Tiong Hwa bernama Han Kikko dan lain yang telah mengelola pabrik. Total volume hasil produksi dari penggilingan ini pada tahun 1830 mencapai 36.000 pikul dan pada tahun 1834 meningkat menjadi 120.000 pikul, yang dari jumlah itu orang bisa jadi luar biasa

(*afleiden ongemeenen aanwas*) (H.I.

Domis, 1936:54)

Peta di bawah menunjukkan detail gambaran wilayah Pasuruan – dengan wilayah *Regentschap* Malang di dalamnya, pada tahun 1854. Peta ini merupakan cetakan pertama yang dihasilkan pada tahun 1854.

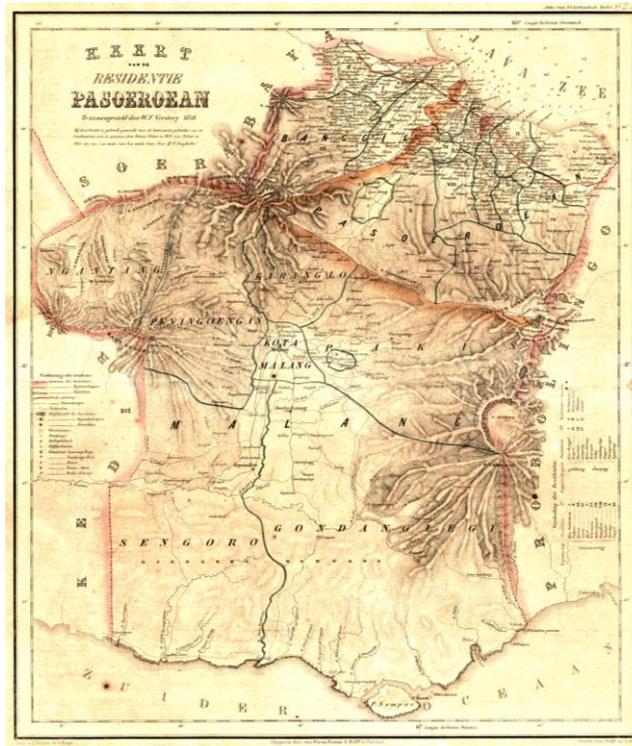
Industri perkebunan pertama kali berkembang di Pasuruan pada tahun 1829. Jenis industri itu adalah penggilingan gula dan penyulingan arak. Perkembangan ini diikuti ke arah selatan yaitu ke Lawang. Pada saat itu belum dijumpai industri indigo, kecuali industri rumah tangga. Perkembangan Industri perkebunan ini juga terjadi di kawasan pedalaman, Malang. Jika jenis industri di Pasuruan didominasi gula, maka di Malang – yang merupakan dataran tinggi, kopi lebih banyak mendominasi. Sejumlah besar tanaman kopi ditemukan di kawasan distrik Penanggungan, Pujon, dan Ngantang. Perkebunan kopi ini berkembang sejak tahun 1830 pada saat Gubernur Jendral Van Den Bosch. Diperkirakan kopi yang dihasilkan antara 80 hingga 90.000 pikul dan untuk tebu sebesar 16 hingga 20.000 *pikul*. Perolehan hasil kopi terbesar dicapai pada tahun 1839 dengan hasil 85.903 *pikul*. Penyumbang terbesar kopi adalah Kabupaten Malang dengan 56.917 *pikul*. Disamping kopi, juga ditemukan tanaman tembakau (Domis, 1836:69)

Pada tahun 1839, bupati Malang RT Notodiningrat I diganti oleh anaknya yaitu Raden Ario Adipati Notodiningrat II. Pada masa pemerintahan Notodiningrat II ini, wilayah Malang mulai berkembang sebagai penghasil kopi dan tebu rakyat. Dari sudut pandang ekonomi, era Bupati kedua ini merupakan era perkebunan. Dari segi politik administrasi, periode tersebut merupakan

periode reorganisasi wilayah, khususnya di daerah distrik kota. Wilayah *ondersidtrik* kota dibagi ke dalam bea *wijk-wijk*. Batas-batas *wijk* untuk kota Malang baru ditetapkan pada tahun 1873 berdasar surat keputusan Residen Pasuruan tanggal 15 Juli 1873 (Politiek Verslag Afdeeling Malang, 1873). Kemajuan kabupaten Malang ini setidaknya terlihat dari perubahan gelar bupati dari Raden

Tumenggung ke Raden Adipati. Gelar Raden Tumenggung pada umumnya dianugerahkan untuk pejabat bupati di wilayah yang tidak terlalu produktif, sementara gelar Raden Aria Adipati diberikan untuk bupati yang berkuasa di wilayah yang produktif (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1822). Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Regering Reglements 1854.

Gambar 1. Peta Karesidenan Pasuruan



(Sumber: Baron Melvill van Carnbee dan W F Versteeg, Algemeen Atlas van Nederlandsch Indie; Batavia: van Haren Noman en Kolff, 1853-1862

Disamping berstatus sebagai kabupaten, Malang juga berstatus sebagai *afdeeling* di dalam hirarki birokrasi Eropa. *Afdeeling* Malang ini dipimpin oleh asisten

residen dan sebagai asisten residen pertama adalah J.C. Hoffman yang diangkat pada tahun 1824. Baik pusat pemerintahan kabupaten maupun pusat pemerintahan

afdeeling berada di kota yang sama. Pusat kegiatan Pemerintahan kabupaten berada di pendopo kabupaten dan *afdeeling* berada di kantor Asisten Residen (van Schaik, 1996:14).

Periode pemerintahan Bupati RAA Noto Adiningrat II dapat dikatakan sebagai periode emas dalam rangkaian perkembangan Malang sebagai pusat industri perkebunan. Kondisi alam merupakan faktor penentu dinamika perkembangan kawasan di Ujung Timur Pulau Jawa ini. Kawasan Kabupaten Malang memiliki dua karakter utama.

Karakter pertama adalah karakter pegunungan-dataran tinggi. Kawasan dataran tinggi ini mencakup kawasan Distrik Ngantang, Penanggungan, Pakis, dan Karanglo. Karakter kedua adalah karakter dataran rendah. Kawasan ini mencakup distrik Turen, Sengguruh, dan Gondang legi. Perbedaan karakter ini mempengaruhi vegetasi yang berkembang di kedua kawasan tersebut. Tanaman kopi lebih banyak berkembang di kawasan pegunungan, sementara tebu lebih mendominasi tanaman perkebunan kawasan dataran rendah.

Tabel 2. Volume Produksi Kopi dari Tahun 1818-1830 di *Regentschap* Malang

No	Tahun	Hasil Produksi (pikul)
1	1818	8.600
2	1819	10.000
3	1820	10.600
4	1821	22.400
5	1822	22.700
6	1823	34.700
7	1824	32.900
8	1825	28.000
9	1826	45.000
10	1827	46.000
11	1828	32.500
12	1829	52.600
13	1830	56.900

Sumber: Domis (1936:62)

Laju peningkatan volume produksi Kopi sejak tahun 1818 hingga tahun 1830 dapat dilihat pada tabel diatas. Kopi-kopi ini merupakan tanaman tegalan, hutan, dan tidak begitu menuntut kerumitan sistem irigasi. Oleh karena itu pengembangan lahan perkebunan kopi menjadi lebih mudah daripada perkebunan tebu yang menuntut infrastruktur irigasi.

PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KOPI DAN TEBU MENJELANG ABAD XX

Perubahan cepat yang dirintis pada masa R.A.A Noto Adiningrat II semakin dipercepat pada saat pemerintahan Raden Adipati Aria Notodiningrat III (1884-1894).

Sekalipun tren harga kopi mulai menurun di pasar dunia, peranaman kopi masih terus berlangsung. Kawasan perkebunan kopi terpusat di Kota Malang, Penanggungan, dan Ngantang. Selama satu tahun (1901), penduduk di kawasan distrik Kota Malang, Penanggungan, dan Ngantang mampu menyeter 3831 *pikul* kopi. Tidak seperti industri gula yang padat modal dan teknologi tinggi, industri kopi relatif lebih sederhana.

Biji kopi dipanen oleh petani kemudian diserahkan ke pengumpul. Dalam hal ini, petani merupakan kelompok terbawah dalam hirarki produksi. Level di atas petani adalah mantri kopi. Mantri kopi bertugas menerima setoran dari petani untuk kemudian diproses di tempat *pen-sangrai* (*koffieverbranding*) untuk kemudian digiling (*koffiepellerij*). Seperti halnya mantri di daerah Lumajang, Bangil, Kraksaan, dan Pasuruan, mantri Malang terdiri atas 2 tingkatan. Setiap mantri mengangkut kopi dari ladang ke penggilingan mereka memperoleh uang jalan. Untuk mantri kelas I memperoleh uang jalan sebesar 15 rupiah. Disamping itu, mantri kelas 1 memperoleh upah 60 rupiah per bulan. Dengan demikian mereka mendapat upah 75 rupiah (*Tjahaja Timoer*, 19 November 1917).

Di dalam struktur organisasi *onderneming* kopi, posisi tertinggi ada pada pemegang lisensi. Pemegang usaha *pensangrai* dan penggilingan kopi ini hanya boleh menjalankan usaha setelah mendapat lisensi. Pemegang lisensi itu berfungsi sebagai leveransir. Perusahaan leveransir ini merupakan pihak yang paling memperoleh keuntungan dari perkebunan kopi. Beberapa pemegang lisensi leveransir kopi itu antara lain NV Koffiepellerij Sisir, F.Godia, G.C. Verstege, G.C. Verhey, dan P.D.Vreede.

Masing-masing pemegang lisensi memiliki wilayah / rayon tersendiri yang tersebar dari Kota, Penanggungan, Ngantang, Karang Lo, Pakis, Sengguru, dan Tengger. Di antara berbagai perusahaan tersebut, NV Koffiepellerij Batu merupakan perusahaan yang menguasai pengiriman kopi hingga 63,7%. Perusahaan ini menguasai kawasan penanaman Kota, Batu, Penanggungan, dan Ngantang (Hudiyanto, 2011:45).

Sisi lain dari kegiatan produksi kopi di Kabupaten Malang adalah munculnya aktivitas dan lembaga tambahan. Proses penanaman, distribusi, dan pengepakan itu menuntut adanya sebuah pengawasan, terutama berkait dengan tol dan monopoli penjualan kopi. Hingga pertengahan abad XIX, penduduk Bumiputra telah mampu mengembangkan perkebunan kopi di lahan mereka sendiri, terutama yang berasal dari distrik Pakis dan Penanggungan. Di daerah tersebut banyak penduduk yang bisa mendapatkan 100 hingga 200 *pikul* kopi dari kebunnya sendiri dengan mengirimkan produk itu ke gudang pemerintah (*Algemeen Verslag Residentie Pasoeroean 1847*). Mereka Hingga tahun 1910-an, kawasan sekeliling alun-alun Kabupaten Malang masih didominasi oleh gudang kopi. Pada umumnya penanaman kopi tidak hanya dilakukan dalam lingkup industri namun juga dilakukan oleh rakyat, terutama di kawasan pinggiran hutan. Penyebaran penyakit *Bladziekte* membuat produksi kopi mengakhiri masa keemasan pada tahun 1910 (Koloniaal Verslag, 1911:211)

Jika di kawasan Malang Barat dan Utara, kopi menjadi produk utama sebagian besar penduduk kawasan tersebut, tebu menjadi tanaman dominan di kawasan Malang Selatan, Barat Daya, dan Tenggara.

Sentra produksi ada di kawasan Bululawang, Gondanglegi, Dampit, Sumberpucung, dan Wajak. Selain bekerja di bidang perkebunan swasta, penduduk kabupaten di distrik-distrik tersebut juga mengembangkan tebu secara mandiri, atau disebut tebu rakyat. Kawasan perkebunan tebu rakyat itu berada di kawasan Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Dampit, Sumbermanjing, Sumberpucung hingga Pakis Aji (*Koloniale Studien 1928*, 15-16). Penduduk di kawasan distrik tersebut menyeter hasil kerja mereka ke beberapa pabrik-pabrik gula. Pabrik gula itu adalah Kebonagung, Kreet, Sempal Wadak, dan Panggunrejo (Elson, 1983:131). Selain kopi dan gula, terdapat kawasan yang merupakan penghasil tembakau yaitu di distrik Pakis. Pemegang lisensi pembelian tembakau dan pemodal adalah Han Khoen Ko dan *Handelsvereniging Amsterdam* (HVA). Berdasarkan laporan produksi perusahaan ini, dalam satu tahun (1921) penduduk di distrik Pakis sanggup menghasilkan 41.250 kg tembakau (*Koloniaal Verslag, 1922, bijlage A*).

PERTUMBUHAN PEMUKIMAN DAN PENDUDUK

Ekonomi perkebunan telah menjadikan Malang sebagai kabupaten yang menarik perhatian pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keberhasilan pengemban ekonomi perkebunan telah memberikan dampak berantai berupa pembukaan jalur kereta Api ke Malang-Surabaya pada tahun 1879, pembangunan jalur Tram Malang-Dampit dan Malang-Tumpang pada tahun 1889, munculnya perusahaan dagang, pertokoan, rumah sakit, sekolah, dan lembaga riset perkebunan. Efek-efek ini mulai memperkuat

karakter Kota Kabupaten sebagai pusat birokrasi dan ekonomi di seluruh Kabupaten semakin dominan dengan nuansa kolonial Belanda.

Pertambahan jumlah penduduk di wilayah kota dan *afdeeling* Malang lebih banyak ditentukan oleh dua kondisi yaitu perkembangan sektor perkebunan dan ketahanan terhadap wabah penyakit. Pada periode sebelum tahun 1914, penduduk di kawasan onderdistrik kota Malang sering terjangkit wabah penyakit pes dan kolera. Akan tetapi wabah itu hanya terjadi selama periode yang pendek sehingga, faktor yang lebih menentukan dalam proses pertambahan penduduk adalah perkembangan lahan baik sawah maupun tegalan. Perkembangan sektor perkebunan itu telah menarik orang-orang dari daerah di luar Malang baik dari Jawa Tengah maupun Madura. Berdasar informasi tersebut, jumlah penduduk tahun 1847 di seluruh *Afdeling* Malang adalah 87.990 jiwa dengan perincian pada tabel 3.

Berdasar uraian angka pada tabel 3 maka dapat dikatakan bahwa komposisi penduduk di *afdeeling* Malang sudah mulai beragam. Jumlah penduduk bumiputera bahkan telah mencapai angka di atas 80.000. Angka ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan kawasan lain pada tahun yang sama. Terjadi pertambahan penduduk sekitar 3.490 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 1846. Pertambahan penduduk terjadi di *Afdeling* Malang disebabkan oleh migrasi dan kenaikan angka kelahiran. Migrasi terutama berasal dari daerah Kediri, Surabaya, dan Pasuruan. Perpindahan penduduk itu berkaitan dengan pembukaan lahan di kawasan distrik Kota Malang, Sengoro (Sengguruh), dan Gondanglegi. Disamping oleh migrasi,

pertambahan jumlah penduduk juga disebabkan oleh adanya peningkatan kemakmuran sebagai dampak dari perkembangan industri, perkebunan, dan perdagangan. Penyebab berikutnya adalah pengembangan pelayanan vaksinasi cacar semenjak tahun 1850 (van Schaik, 1996:30). Perhatian pemerintah kolonial terhadap kepentingan usaha perkebunan dibuktikan dengan pembangunan klinik khusus buruh

perkebunan. Klinik itu diberi nama Lavalette. G Ch Reynard de La Valatte adalah seorang pengusaha perkebunan terkemuka di Malang pada tahun 1912. Selain menjafi pengurus *Algemeen Landbouw Syndicaat*, dia juga merupakan anggota Gemeenteraad Malang pertama di tahun 1914. Lakeman, *Stadsgemeente Malang 14 April 1914-1934* (Lakeman, 1934:19).

Tabel 3. Jumlah penduduk afdeling Malang tahun 1847

Etnis	Jumlah
Jawa	83.419
Madura	3.881
Eropa	103
Arab	8
Melayu	114
Cina	465

Sumber: Algemeen verslag van de Afdeling Malang 1847, Koleksi arsip Pasuruan. ANRI

Perkebunan, perkembangan bidang perkonomian kabupaten pasca 1870 telah menyebabkan migrasi terus berjalan. Pertambahan jumlah penduduk di wilayah kota dan kabupaten Malang lebih banyak ditentukan oleh dua kondisi yaitu perkembangan sektor perkebunan dan ketahanan terhadap wabah penyakit. Pada periode sebelum tahun 1914, penduduk di kawasan onderdistrik kota Malang sering terjangkit wabah penyakit pes dan kolera. Akan tetapi wabah itu hanya terjadi selama periode yang pendek sehingga, faktor yang lebih menentukan dalam proses pertambahan penduduk adalah perkembangan lahan baik

sawah maupun tegalan. Wabah lain yang sering mengancam penduduk Malang adalah *Spaansje Influenza*. Faktor lain yang berpengaruh adalah kemajuan ekonomi. Ada banyak *onderneming* yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pekerjaan itu belum termasuk aktivitas pertanian dan peternakan yang menjadi pekerjaan sampingan bagi penduduk Bumiputra. Khusus penduduk lapisan bawah, yaitu para kuli, mereka memperoleh upah per harinya di kisaran 40 sen hingga 50 sen (Algemeen Verslag van der Residentie Pasoeroean 1847).

Penduduk Tionghoa dan Madura berdatangan pada kurun 1855-1885. Orang-

orang Madura itu bekerja sebagai buruh lepas di tanah-tanah tegalan sementara orang Tionghoa menjalankan fungsinya sebagai pedagang. Keberadaan mereka tidak terlepas dari posisi onderdistrik Malang sebagai kota transito. Pada umumnya para penanam kopi itu membutuhkan waktu cukup lama untuk mengangkut kopi dari daerah pedalaman ke onderdistrik kota. Di Onderdistrik kota, kopi harus diproses (*verbranding en pellerij*) untuk kemudian dipak ke pelabuhan Surabaya. Proses itu membutuhkan waktu sehari-hari sehingga mereka untuk

sementara harus tinggal di onderdistrik kota Malang.

Proses migrasi ini berlangsung terus hingga memasuki abad XX. Empat puluh tahun setelah tahun 1890, daerah Malang mengalami penambahan penduduk Eropa dan Tionghoa yang cukup pesat, masing-masing 1500% dan 400%. Diantara 5 kota di wilayah karesidenan Pasuruan, kota Malang menempati rangking tertinggi dalam prosentasi penambahan penduduk seperti pada tabel 4 berikut. Elaborasi data tersebut terdapat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Pertumbuhan Penduduk di Kota-Kota Utama di Wilayah Pasuruan 1890-1930

Tahun	Pasuruan	Bangil	Malang	Probolinggo	Kraksaan	Lumajang
1890	23.871	14.167	12.040	9.494	2.041	8.296
1905	28.534	17.866	29.541	14.564	3.667	16.128
1920	34.138	16.463	42.981	26.617	4.234	16.997
1930	36.973	20.236	86.646	37.009	4.738	18.838
Pertambahan prosentase	55	43	620	290	132	127

Sumber: Kolonial Verslag 1892 dan 1907 dan Volkstelling 1930

Kedatangan mereka membawa serta uang, *skill*, dan sejumlah kebutuhan yang mendorong proses industrialisasi kota. Disamping itu, banyak pendatang berasal dari Jawa Tengah dan Timur, Madura yang menetap di Malang. Di daerah tertentu, misalnya Distrik Tumpang, Malang, Bululawang, Pagak, dan Turen – yang merupakan sentra-sentra *onderneming*, jumlah migran terbesar berasal dari etnis Madura. Di Bululawang, perbandingan jumlah pendatang etnis Madura dan Jawa adalah 28,37% dibanding 71,52% (Volkstelling 1930:20). Angka 28,37 ini

merupakan presentasi tertinggi jika dibandingkan distrik-distrik lain di Kabupaten Malang. Di Distrik Singosari, Pujon, dan Kepanjen, jumlah migran dari etnis Madura tidak begitu besar, dan sebagian besar dari Jawa Tengah. Khusus daerah Pagak, imigran didominasi orang Purworejo, Kulon Progo, dan Wonogiri. Sementara distrik Turen didominasi pendatang dari kawasan Kedu, Jepara, Rembang, Kulonprogo dan Surakarta. (Volkstelling 1930:28) Secara umum, jumlah pendatang ini termasuk terbesar diantara beberapa kabupaten lain di Jawa Timur dan data ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Jumlah migran dari Yogya-Surakarta ke Jawa Timur

Kabupaten	Daerah asal	Yogyakarta	Surakarta
Malang		14.419	7.599
Banyuwangi		13.267	2.644
Blitar		10.903	7.637
Kediri		5.078	4.914
Jember		4.597	2.079
Surabaya		1.369	2.283

Sumber: Volkstelling 1930 Deel III. Inheemsche Bevolking van Oost Java

PERKEMBANGAN PASAR DAN KANTOR PEMERINTAH-SWASTA

Faktor demografi ini berdampak pada sektor lain yaitu pasar. Keberadaan pasar menjadi pemicu kehidupan ekonomi kota. Di *Onderdistrik* kota Malang terdapat komunitas Eropa, Arab, dan Melayu yang ketiganya mengembangkan usaha perdagangan. Seorang pedagang Eropa di kota Malang yang dikenal sebagai pedagang besar adalah H Spruytenburg. Dia menjalankan usaha perdagangan barang kebutuhan sehari-hari. Lambat laun jiwa industri mulai tumbuh di antara para pedagang-pedagang lain yang masih berada pada skala menengah. Pada tahun 1870-an, penambahan penduduk semakin cepat. Hingga akhir tahun 1872 jumlah orang Eropa di Hindia Belanda 284 jiwa. Di antara mereka terdapat kaum *mestizo* (*Politiek verslag Afdeling Malang 1873*).

Selain warga Eropa, peran sebagai pedagang banyak dilakukan warga Tionghoa. Mereka membeli kopi atau tembakau yang

dihasilkan oleh petani. Jumlah warga Tionghoa hingga akhir Desember 1872 berjumlah 1.178. Disamping warga Tionghoa, warga Timur Asing lain adalah warga keturunan Arab. Warga keturunan Arab hingga akhir Desember 1872 berjumlah 51 orang. Profesi mereka sebagian besar adalah pedagang eceran. Sebelum tahun 1873, komunitas ini berada di bawah kepala kampung penduduk Malang (*Koloniaal Verslag, 1911:217*).

Melalui surat keputusan Residen Pasuruan tanggal 20 Juni 1873 no 3.959 mereka mulai dipimpin oleh kepala kampung mereka sendiri. Kepala kampung warga Arab dan *Mooren* Kabupaten Malang yang pertama bernama Said Mohammad bin Abu Bakr Al Habsyi. Disamping orang Arab, terdapat komunitas Melayu. Dari data yang sempat diperoleh, hingga akhir Desember 1872 terdapat 215 orang etnik Melayu. Kepala kampung Melayu *Afdeling* Malang adalah *encik* Rusdi (Rasidin?). Sebagian besar warga Melayu berprofesi sebagai pedagang kecil. Komposisi masyarakat ini

diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan hingga kedatangan beberapa batalyon kavaleri dan infanteri yang akan menempati kampement yang baru dibuka di tahun 1890-an. Bangunan permanen pada saat itu masih terbatas pada rumah Asisten Residen, Kantor dan “bank” (*geldkamer*), penjara, rumah kontrolir, gudang, kopi dan sebuah rumah blok. Bangunan lain yang disebut sebagai bertembok dan beratap adalah rumah ibadah, itupun hanya dijumpai di *hoofdnegorij* atau kota. Infrastruktur jalan hanya dapat dimanfaatkan pada musim penghujan. Para petani kopi sangat mengandalkan jalan ini untuk transportasi kopi (*Politiek Verslag Afdeeling Malang*, 1873).

Perkebunan telah membuat kawasan Malang menjadi sasaran investor asing yang ingin menanamkan modal di bidang perkebunan. Perkebunan ini tersebut di kawasan Malang Barat, Tenggara, dan Selatan. Para pengusaha ini pada umumnya mencari hiburan di Societeit yang hanya ada di Kota Malang. Jarak kota dengan *Onderneming* pada umumnya sangat jauh sehingga harus menginap. Beberapa hotel berdiri untuk kepentingan mereka. Salah satu hotel yang didirikan khusus untuk kalangan pengusaha perkebunan adalah Hotel Splendid. Empat komisaris hotel ini adalah tokoh pengusaha perkebunan. Hotel yang didirikan pada tahun 1923 oleh C.Ch Mulie ini mengalami titik puncak kejayaan pada tahun 1929-1930. Setelah sempat mengalami kemunduran pada masa Depresi Ekonomi 1930, hotel ini kembali ramai. Hotel ini merupakan “kepercayaan” dari komunitas perkebunan yang dibuktikan dengan kedatangan *Malangsche Landbouw Vereeniging*, *Besoekisce Landbouw Vereeniging*,

dan *Kedirische Landbouw Vereeniging* dalam Jubileum Hotel Splendid pada tahun 1936 (*De Malanger*, 4 Maart 1936). Dampak lain adalah pendirian beberapa kantor cabang perusahaan dagang besar di Malang. Perusahaan itu antara lain *Handels Vereeniging Amsterdam* (HVA) yang berada di jalan Lowokwaru. Disamping itu, terdapat rumah sakit khusus Perkebunan yaitu Poliklinik Lavalette beberapa *Proefstation* (Laboratorium) dan Sekolah Perkebunan.

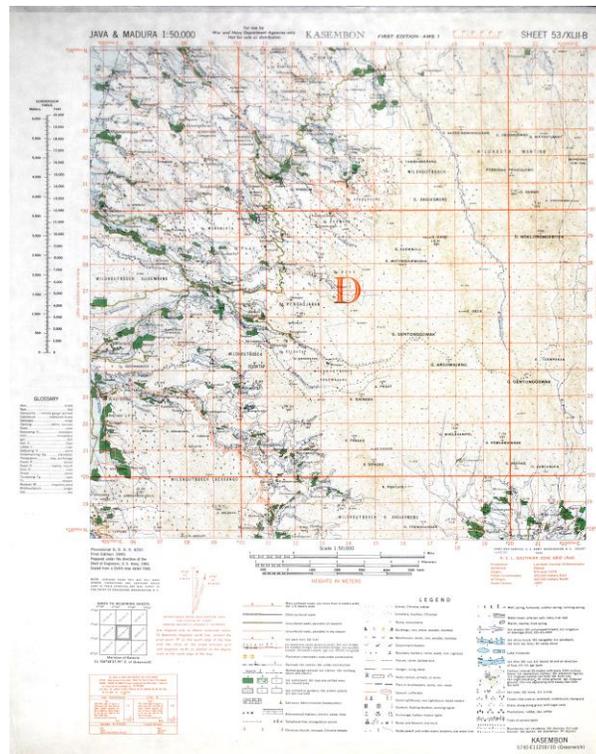
INFRASTRUKTUR JALAN DI PEDESAAN

Salah satu dampak terpenting dari aktivitas perkebunan adalah perluasan jaringan transportasi. Sebagai sebuah aktivitas ekonomi yang berorientasi pasar internasional, perusahaan perkebunan menuntut kemudahan transportasi untuk menghindarkan terjadinya penyusutan kualitas dari produk yang dibawa. Beberapa titik produksi terletak di pedalaman sehingga menuntut adanya penghubung antara pusat produksi dengan daerah pengumpul. Salah satu wilayah penghasil produk perkebunan adalah Onderdistrik Kasembon, di Distrik Ngantang. Berdasar catatan Domis, daerah Ngantang sudah dikenal sebagai pemukiman sebelum tahun 1830. Daerah ini menghubungkan Malang dan Kediri. Kawasan ini kemudian dilirik oleh pemerintah kolonial karena memiliki kesuburan. Daerah Ngantang hingga Pare selalu menerima hujan abu vulkanis jika Gunung Kelud meletus.

Ada dua peta peninggalan kolonial Belanda yang menunjukkan bahwa setelah tahun 1875 terdapat beberapa *onderneming* yang sudah menjalankan usaha di kawasan Ngantang. Peta dari *American Maps Service*

yang mengacu pada peta kolonial Hindia Belanda, menyebutkan adanya beberapa *onderneming* yang tersebar di beberapa wilayah di Onderdistrik Kasembon. Beberapa nama *ondernemin* itu antara lain Seloatap, Soerowinangoen, Wonomerto, Wonoredjo, Wonokerso, Oebalan, Pengdjaran, Segoe-noeng, Dilem, Pangloengan, Bagongan, dan Tjarangwoeloeng. *Onderneming-onderneming* itu dihubungkan dengan jalan sekunder menuju jalan primer yaitu jalan raya Kasembon-Ngantang-Pare. Jika dilihat dari

keterangan peta dan pola jalan yang berkelok-kelok maka diperkirakan kondisi daerah di kawasan tersebut merupakan daerah pegunungan. Keberadaan jalan itu turut mendorong terbentuknya pusat permukiman di Kasembon. Kasembon menjadi wilayah penting dalam sistem distribusi perkebunan di Afdeeling Malang. Dengan demikian, aktivitas perkebunan telah mendorong perkembangan wilayah pedalaman di Malang.



Gambar 2. Onderdistrik Kasembon, Distrik Ngantang, Kabupaten Malang 1943

PENUTUP

Sejarah abad XIX merupakan sejarah perkebunan. Perkebunan merupakan inti dan awal mula proses modernisasi infrastruktur,

perubahan struktur ekonomi, dan sosial serta menjadi benih munculnya gerakan nasionalisme di Jawa. Jika memakai apa yang pernah dikatakan T Ibrahim Alfian tentang *analysis of contra-factual*, maka kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan

Pulau Jawa jika tidak ada perkebunan? Maka bisa dibayangkan kota-kota pedalaman seperti Malang, Jember, Madiun, Kediri dan Majakerta baru berkembang setelah abad XX atau mungkin baru berkembang setelah 50 tahun Indonesia merdeka. Jawa akan menjadi pulau agraris yang memiliki keutuhan tradisi seperti Pulau Bali karena tidak adanya faktor eksternal yang memberikan akselerasi perubahan sosial ekonomi di Jawa. Perkebunan telah menjadikan Jawa Pulau yang paling ekstensif menerima pengaruh kolonial

Perkebunan juga memunculkan permasalahan agraria. Sebelum masuknya ekonomi perkebunan pada awal abad XIX, tanah di pedalaman Jawa tidak begitu bernilai ekonomis. Aktivitas perkebunan telah mengubah nilai sebidang tanah. Seiring peningkatan jumlah penduduk dan keragaman peluang pekerjaan yang ditawarkan sektor perkebunan menjadikan proporsi tanah dan penduduk mulai tidak seimbang. Pertumbuhan kota dan migrasi memunculkan fenomena perebutan ruang di level perkotaan. Di level pedesaan, perkembangan perkebunan menciptakan perubahan lanskap fisik. Dampak dari aktivitas industri perkebunan adalah perluasan jaringan jalan. Terbentuknya jaringan jalan ini telah menyebabkan kondisi frontier Kabupaten Malang menjadi berakhir. Terbentuknya desa-desa baru sebagai efek dari pembukaan lahan perkebunan merupakan faktor terpenting dalam perubahan sosial ekonomi di Jawa sistem jaringan jalan yang menghubungkan kota onderdistrik dengan desa-desa di sekelilingnya. Dengan demikian, perkebunan telah menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi daerah pedalaman.

Sekalipun banyak dampak positif yang dihasilkan dari perkebunan, aktivitas ini menciptakan degradasi lingkungan. Degradasi itu antara lain berkurangnya jumlah hutan akibat pelebaran kawasan perkebunan. Industri gula telah menghasilkan limbah dan asap yang memberikan kontribusi terhadap berkurangnya kualitas lingkungan. Dampak dari penempatan Kota Malang sebagai sentra distribusi dan simpul arus modal telah berdampak pada perkembangan infrastruktur. Hotel, rumah sakit, sekolah, villa, dan sarana olahraga beserta infrastruktur pendukungnya yang merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi komunitas perkebunan sebagian masih berfungsi hingga saat ini.

Sebagai penutup, ekonomi pertanian baik sawah irigasi maupun tadah hujan yang mendominasi penduduk *Regentscahp* Malang telah membentuk karakter penduduk yang bergantung pada struktur sosial yang berbasis kepemilikan tanah. Perluasan lahan perkebunan telah menciptakan perubahan lanskap sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Algemeen verslag van de Afdeling Malang* 1847, Koleksi arsip Pasuruan. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Algemeen Verslag Residentie Pasoeroean* 1875, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Algemeen verslag van de Afdeling Malang* 1847, Koleksi Arsip Pasuruan.
- Algemeen Verslag Residentie Pasoeroean* 1875, Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Le Roy, A.A.C. 1928. "Opkoop van Bevolkingsriet in de afdeeling Malang." *Koloniale Studien* 1928. Twaalfde Jaargang. Weltevreden: G.Kolff & Co.
- "Apa Lantaranja", Tjahaja Timoer 19 November 1917
- Domis, H.I, 1836. *De Residentie Pasoeroeang. Gravenhage: Gedrukt bij H SJ De Groot, MDCCCXXXVI*
- Elson, R.E. 1984. *Javanese Peasant and the Kolonial Sugar Industry. Impact and Change in an East Java Residency*. Singapore: Oxford University Press.
- Hudiyanto, R. 2011. *Menciptakan Masyarakat Kota. Kota Malang di Bawah Tiga Penguasa 1914-1950*. Yogyakarta: Lilin.
- "Jubileum Hotel Splendid te Malang", De Malanger 4 Maart 1936
- Kartodirjo, S. 1973. *Protest Moverment in of Rural Java. A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth an Early Twentieth Century*. Singapore: Oxford
- Kolonial Verslag 1911
- Koloniaal Verslag 1922
- Lakeman, P.K.W. 1934. *Stadsgemeente Malang 14 April 1914-1934*. Malang: G. Kolff & Co
- "Malang Terpandang dari Loear dan Dalem" Tjahaja Timoer 29 Juli 1921
- Multatuli. 2014. *Max Havelaar*. Bandung: Qanita.
- Padmo, S. *The cultivation of Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and Its Impact on Peasant Economy and Society 1860-1960*. Yogyakarta: Aditya Media. 1994
- Politiek verslag Afdeling Malang 1873*. Koleksi Arsip Pasuruan. ANRI
- Purwanto, B. 1992. "From Dusun to The Market. Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra 1870-1940". *PhD Dissertation* University of London
- Robinson, R. 2009. *Indonesia: The Rise of Capital*. Singapore: Equinox Publisher.
- Moertono, S. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonsia
- Pranoto, S. W. 1993. *Apanage dan Bekel. Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacara.
- Suroyo, A M. J. 1989. "Kerja Wajib sebagai eksploitasi colonial. Perkembangan karesidenan kedu 1800-1900". *Ph.D Dissertation* UGM Yogyakarta
- Staatsblad van Nedelandsch Indie 1822

- Sutherland, H. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- “Tuan Kidang di Kaki Semeru”. Tempo, 26 Agustus 2012
- van Carnbee, B. M. dan W F Versteeg. 1862. *Algemeen Atlas van Nederlandsch Indie*. Batavia: van Haren Noman en Kolff.
- Van Schaik, A. 1996. *Malang. Beeld van een Stad*. Purmerend Asia Maior
- Volkstelling 1930. *Bundel I Deel III. Inheemsche Bevolking van Oost Java*. Welteverden: Landsdrukkerij.